



Bawa Uang Satu Ransel

Pengacara Art Center Bayar Denda ke Kejari

DENPASAR - Setelah dua terpidana kasus korupsi Art Center Ketut Suastika dan Mantara Gandhi dijebloskan ke penjara, Selasa kemarin (5/4) Pengacara Art Center Ketut Ngastawa terlihat di Kejari Denpasar. Dia membawa duit satu ransel yang jumlahnya Rp 150 juta. Uang ini ternyata untuk membayar denda dari masing-masing terpidana.

Ngastawa mengatakan bahwa, pembayaran denda baru dilakukan. "Ini bawa uang satu ransel, ini untuk bayar denda ha..ha..ha," ungkapnya. Bahkan sempat diperlihatkan dua

bungkus uang pecahan Rp 100 ribu itu. dia mengatakan Rp 50 juta denda untuk Mantara Gandhi, sedangkan Suastika Rp 100 juta. "Sehingga totalnya Rp 150 juta dalam satu ransel ini," ungkapnya.

Dia mengatakan, pola pembayaran denda ini dulunya dengan menyerahkan ke bendahara di Kejari. Namun mekanisme sudah berubah, Ngastawa yang juga bersama dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus ini Made Tangkas, akhirnya mesti menunggu. "Polanya sekarang beda, uang denda mesti langsung masuk ke Bank nanti langsung masuk rekening kemana denda ini masuk," ujar Ngastawa mesti menunggu.

Sedangkan untuk pengembalian kerugian Negara, Ngast-

wa mengatakan sudah lama dibayar. Sehingga kewajiban dari terpidana sudah lengkap, tinggal menjalani tahanan saja.

Seperti halnya berita sebelumnya, dua terpidana sudah menjalani hukuman penjara. Sebelumnya terdakwa Suastika divonis 14 bulan atau 1 tahun 2 bulan dan Mantara Gandhi divonis lebih rendah yaitu 13 bulan atau 1 tahun 1 bulan.

Dalam vonis hakim disampaikan bahwa terdakwa terbukti bersalah, melanggar pasal 3 ayat 1 jo pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 yang telah

dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Akhirnya Hakim memvonis Suastika dengan hukuman 1 tahun 2 bulan, dengan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan. Artinya jika tidak membayar denda hukumannya bertambah 2 bulan. Hukuman ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yaitu 1 tahun 6 bulan atau 1,5 tahun. Sedangkan dendanya sama Rp 100 juta, namun subsidernya dalam tuntutan 6 bulan.

Sedangkan untuk Mantara Gandhi hakim memvonis 1

tahun 1 bulan atau 13 bulan. Dengan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan. Jika tidak membayar denda bertambah 1 bulan hukumannya. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa, yaitu dituntut 1,5 tahun dan Rp 50 juta subsider 3 bulan. Dua terdakwa sebelumnya sudah mengembalikan kerugian negara.

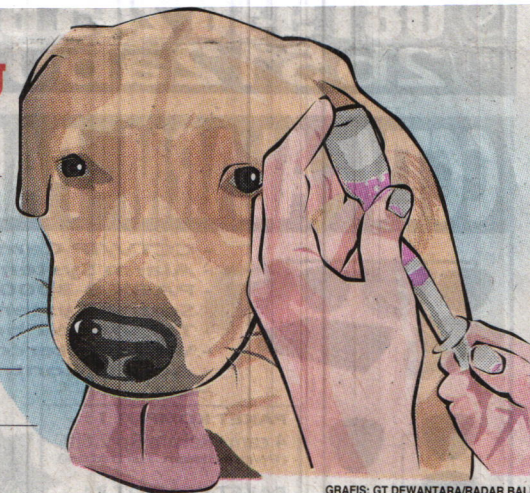
Kasus ini berawal dugaan korupsi pengadaan lighting dan sound system di Art Center. Dengan kerugian negara Rp Rp 812.135.337 atau (Rp 812 juta lebih). (art/han)



Gigitan Tinggi, VAR Habis

Habisnya VAR di Badung

- ▶ Pemkab Badung sendiri menyiapkan anggaran pengadaan VAR pada APBD tahun 2015 sebesar Rp 3,5 miliar.
- ▶ Rencananya VAR terealisasi Januari 2015, sehingga persediaan VAR di Kabupaten Badung tidak sampai habis.
- ▶ Tapi, VAR per 5 Januari 2015 masuk dalam sistem e-katalog, sedangkan penyedia VAR Bali belum siap mengadakan e-katalog. Sehingga stok VAR bisa habis.
- ▶ Saat ini, Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) di Badung masih tinggi yaitu 710 orang per bulan.
- ▶ Jika ada kasus GHPR di Kabupaten Badung yang datang ke RSUD atau Puskesmas akan dirujuk ke RSUP Sanglah.



GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI

MANGUPURA - Kabar tidak sedap bagi dunia kesehatan di kabupaten Badung. Sebagai kabupaten terkaya di Bali, Badung kehabisan stok vaksin anti rabies (VAR). Kosongnya VAR di Badung, ini bukan pertama kali. Hal ini membuat gerah Komisi IV DPRD Badung. Sebab, stok VAR habis saat kasus gigitan anjing di *Gumi Keris* sedang meningkat.

Komisi IV DPRD Badung yang membidangi kesehatan pun memperingatkan Dinas Kesehatan (Diskes) agar secepatnya menyediakan stok VAR ke seluruh puskesmas dan RSUD Badung. Pringatan VAR habis ini dilontarkan Ketua Komisi IV, I Nyoman Sutrisno didampingi anggota IB Sunartha. Komisi IV mengaku heran karena kekosongan stok VAR hanya terjadi di Badung. Di sejumlah rumah sakit dan puskesmas di luar Badung menurut Komisi IV masih ada ■

▶ Baca **Gigitan...** Hal 31

Edisi : Kamis, 7 Mei 2015

Hal : 2



Duit Ada, Masalah di Pengamprahan

■ GIGITAN...

Sambungan dari hal 21

Mereka pun menyayangkan stok obat sampai kosong justru terjadi di Badung yang menjadi kabupaten paling kaya di Bali.

"Kami sayangkan, kok stok VAR dibiarkan sampai habis. Masyarakat yang jadi korban gigitan anjing *kan* sangat perlu itu," ujar I Nyoman Sutrisno kemarin (6/5).

Akibat habisnya stok VAR ini masyarakat yang membutuhkan obat serba kesulitan. Dan bukan tidak mungkin nyawa mereka terancam, kalau anjing yang menggigit mereka terjangkit rabies. "Kalau ada yang

digigit anjing rabies gimana? *Kan* bahaya," imbuhnya.

Sebagai komisi yang membidangi kesehatan, pihaknya me-*warning* pemerintah agar cepat tanggap dengan masalah-masalah seperti ini. Kebutuhan obat menurut dia adalah hal utama di samping pelayanan. Pihaknya sangat tidak ingin saat APBD Badung mencapai Rp 3 triliun lebih, justru masyarakatnya mati karena pemerintah tidak mampu menyediakan obat-obatan. "Kami mendesak kebutuhan obat-obatan dan VAR harus segera terpenuhi. Dan semua puskesmas dan rumah sakit di Badung harus punya VAR,"

tegas politisi Demokrat itu.

Sementara itu, Kepala Diskes Badung, dr. I Gede Putra Suteja tak menampik stok VAR sedang kosong. Pejabat yang memiliki gaya bicara blak-blakan, ini mengungkapkan, habisnya VAR bukan disebabkan tidak adanya anggaran. Melainkan akibat terjadinya permasalahan dalam teknis pengamprahan. Pemkab Badung sendiri menyiapkan anggaran pengadaan VAR pada APBD tahun 2015 sebesar Rp 3,5 miliar. Menurut Suteja, rencananya VAR akan terealisasi bulan Januari 2015, sehingga persediaan VAR di Kabupaten Badung tidak sampai habis. Tapi, VAR per 5 Januari 2015

masuk dalam sistem e-katalog, sedangkan penyedia VAR Bali belum siap mengadakan e-katalog. Sehingga stok VAR bisa habis.

Suteja juga mengakui Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) di Badung masih tinggi yaitu 710 orang per bulan. Oleh karena itu, jika ada kasus GHPR di Kabupaten Badung yang datang ke RSUD atau Puskesmas akan dirujuk ke RSUP Sanglah. "Yang pasti kalau ada yang tergigit anjing, kita akan rujuk ke RSUP Sanglah. Tidak ada alasan bagi kami menunda pelayanan. Kami tetap akan maksimal," ujar Suteja. (san/yes)



Radar Bali

PHDI Badung Ngaku Dicatut

Dalam Kasus Tirta Yatra ke India

DENPASAR - Kasus *tirta yatra* ke India, yang dilakukan oleh "PHDI" bentukan Badung ditindaklanjuti serius oleh PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) resmi. Pengurus PHDI Badung, diundang ke PHDI Bali untuk diminta penjelasan atau klarifikasinya, atas dugaan kasus korupsi

dana *tirta yatra* ke India, yang nilainya hampir Rp 1 miliar.

Ketua PHDI Bali Gusti Ngurah Sudiana ketika dikonfirmasi membenarkan, pihaknya sudah menyikapi dengan melakukan rapat. "Namun saat rapat itu, saya ada agenda yang tidak bisa saya tinggalkan. Rapat akhirnya dipimpin oleh Wakil Ketua Bidang Hukum PHDI Bali, Made Raka Suarna," ungkap Sudiana saat dikonfirmasi kemarin ■

► Baca PHDI... Hal 31

Siap Berikan Data-data ke Kejari

■ PHDI...

Sambungan dari hal 21

"Silakan dikonfirmasi ke Made Raka Suarna *ngih*," ujar Ngurah Sudiana dengan santun.

Made Raka Suarna ketika dikonfirmasi membenarkan ada tindak lanjut terkait dengan masalah *tirta yatra* ke India. "Kami menindaklanjuti, ketika polemik muncul menyebut - nyebut nama PHDI. Kami mengundang pihak PHDI Badung, untuk kami minta klarifikasi dan konfirmasi atas polemik ini," ungkap Raka Suarna.

Dia mengatakan, ketika nama PHDI yang disebut - sebut menggunakan dana *tirta yatra* dari APBD Badung, tentu pihak PHDI Bali mesti mengetahui. Karena dipastikan PHDI di Badung ada satu. Yang datang dari pihak PHDI Badung adalah Plt Ketua Wayan Sukayasa didampingi oleh Sekretaris. Memang saat ini dalam kondisi Plt, karena Ketua PHDI Badung Made Mulya meninggal dunia. "Kami tanyakan, kenapa disebut - sebut PHDI menerima dana dan ada *tirta yatra* ke India," ungkap Raka Suarna.

Akhirnya dijelaskan, bahwa sama sekali PHDI Badung tidak ada menerima dana. Termasuk tidak melakukan *tirta yatra* ke India. Kemudian dijelaskan, bahwa ada yang mencatat nama PHDI untuk mendapatkan anggaran *tirta yatra* ke India. "Artinya sudah dipastikan, lembaga yang menggunakan dana APBD itu bukan PHDI. Itu mencatat

nama PHDI. Bukan juga PHDI yang linier, artinya mengacu ke pengurus pusat, pengurus daerah Bali dan Badung. Yang linier PHDI yang saat ini dipimpin oleh Plt Ketua Wayan Sukayasa," ungkapnya.

Dengan kondisi ini, pihaknya mengatakan karena ada pihak yang mencatat menyebut diri PHDI, pihaknya mempersilakan penegak hukum untuk memproses. "Silakan pihak yang mencatat itu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan silakan Kejari Denpasar mengusut secara tuntas, adanya lembaga yang mencatat nama PHDI untuk menjalankan anggaran. Kami memastikan itu bukan PHDI," ungkapnya.

Ada rencana untuk menemui pihak Kejari Denpasar? Raka Suarna mengatakan akan menyampaikan hasil pertemuan ini ke pihak Ketua PHDI. Nantinya baru akan ada langkah - langkah selanjutnya. "Pertemuan ini sudah berlangsung sekitar satu minggu. Kami akan buat resumennya, dan serahkan ke Ketua. Langkah - langkah apa selanjutnya kami tunggu tindak lanjut selanjutnya," jawabnya.

"Namun kami sudah siapkan data - data, SK - SK terkait posisi PHDI dan terkait kepengurusan PHDI yang sah. Kebetulan akan Loka Sabha PHDI Badung, nanti akan dirumuskan juga masalah ini," ungkapnya.

Sedangkan Ketua Sabha Walaka PHDI Pusat Putu Wirata Dwikora mengatakan, akan berkoordinasi juga dengan PHDI Bali. Terutama soal rencana untuk

menemui Kejari Denpasar, untuk memberikan dukungan moral dan siap memberikan data - data terkait legalitas PHDI. "Kami memang ada rencana seperti itu, nanti kami koordinasikan dulu," ungkapnya.

Seperti halnya berita sebelumnya, Kasus dugaan korupsi *tirta yatra* ke Gunung Salak di Inspektorat dan ke India di Dinas Kebudayaan Badung sedang didalami Kejari Denpasar. Namun Bupati Badung AA Gde Agung yang menyatakan tidak permasalahan PHDI ilegal dan legal, namun dilihat manfaatnya. Kondisi ini dianggap ngawur oleh pihak PHDI. Bahkan dipastikan ungkapan itu menyesatkan, karena seorang bupati tidak menghargai asas legalitas. Itu sama artinya juga setuju kalau nantinya ada Bupati Badung ilegal, namun lebih bermanfaat dengan Bupati yang sah.

Sedangkan Kasi Intel Kejari Denpasar Syahrir Sagir menjelaskan setelah menyita beberapa data di Badung, saat ini timnya fokus untuk mempelajari data - data tersebut. Yaitu data *tirta yatra*. Sebelumnya empat pejabat Badung sudah diperiksa. Mereka adalah Kadis Kebudayaan IB Anom Basma, Kepala Inspektorat Ni Luh Suryanti, Kabag Hukum Komang Budi Argawa dan Kabag Keuangan Ketut Gede Suyasa. Atas kondisi ini pihak Badung melempar bahwa dana itu hibah ke PHDI pimpinan Sukada. (art/yes)

Edisi : Kamis, 7 Mei 2015

Hal : 21